

KOENTJARANINGRAT MEMORIAL LECTURE XI/2014 Pangeran Diponegoro (1785-1855) dan Masalah Kepemimpinan Nasional¹

Senin, 19 Mei 2014, 09:00 – 12:00

Auditorium Gedung X, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia – Depok

PANGERAN DIPONEGORO: Pahlawan Nasional

S. Budhisantoso

Pusat Studi Sumberdaya Manusia dan Lingkungan Hidup UI

Bagi rakyat Indonesia pada umumnya, Pangeran Diponegoro tidak asing lagi namanya sebagai salah satu pahlawan nasional yang selalu dikenang. Selain dalam pelajaran sejarah nasional, namanya terabadikan dalam berbagai nama jalan dan gedung-gedung megah di kota-kota besar di seluruh wilayah Nusantara. Bahkan nama besar itu diabadikan dalam kesatuan komando wilayah TNI. Tidaklah mengherankan kalau Pangeran Diponegoro terekam dalam benak setiap warganegara Indonesia di manapun mereka berada dan dari manapun mereka berasal.

Anak-anak mengenal Pangeran Diponegoro sebagai pahlawan nasional sejak mereka mengikuti pendidikan dasar, atau mengenalnya dari orangtua dan kerabat mereka sebelum sekolah. Nama besar itu selanjutnya mudah diingat karena terekam di berbagai nama jalan raya dan bangunan megah serta lembaga pemerintahan sipil maupun militer. Akan tetapi adakah sepak terjang kepahlawanan Pangeran Diponegoro itu masih terekam kuat diingatan dan mengandung kekuatan yang “menjiwai” semangat kebangsaan mereka. Di era pembangunan yang sarat dengan perubahan sosial dewasa ini, masihkah banyak orang yang mengingat dan menghayati sepak terjang kepahlawanan Pangeran Diponegoro yang diabadikan namanya sebagai sarana untuk memperkuat semangat dan kepribadian bangsa Indonesia.

Uraian antropologis ini bukan untuk mengangkat kembali rangkaian perjuangan Pangeran Diponegoro di masa lampau, melainkan untuk memaknainya dalam kaitannya dengan pendidikan dan pembentukan karakter bangsa yang kuat.

Sebagaimana diketahui, kelangsungan hidup suatu kelompok sosial – betapapun kecilnya – tergantung pada keberhasilannya mempersiapkan generasi penerusnya. Untuk mempersiapkan generasi penerus itu diperlukan pendidikan dalam arti luas, tidak terbatas pada pembekalan dengan pengetahuan dan ketrampilan, melainkan yang terlebih penting adalah pembentukan kepribadian yang menjadi landasan hidup bersama sebagai warga yang bertanggung jawab. Dalam kaitan inilah sebenarnya uraian berikut ini akan dipusatkan semoga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan pendidikan dasar sebagai sarana pembentukan kepribadian yang kuat bagi peserta didik di Indonesia.

¹ This file is only used as Paper for 'Koentjaraningrat Memorial Lectures XI/2014' only and remains the property of Forum Kajian Antropologi Indonesia and the writer. No part of it may be reproduced by any means without prior written permission of Forum Kajian Antropologi Indonesia or the writer.

MAKNA KEPAHLAWANAN PANGERAN DIPONEGORO

Kesamaan cita-cita membebaskan diri dari kekuasaan asing telah menjadi satu kekuatan yang memperlancar kelahiran bangsa Indonesia yang warganya tersebar luas di kepulauan Nusantara. Dengan bangga setiap warganegara Indonesia, menyatakan banyaknya sukubangsa yang mendukung anekaragam kebudayaan yang mencerminkan pola-pola paya melupakan betapa sulitnya mempersatukan mereka sebagai satu bangsa yang baru lahir menjelang berakhirnya perang dunia II yang baru lalu.

Sesungguhnya perjuangan untuk membebaskan diri dari kekuasaan asing tidak seberat perjuangan untuk mempersatukan penduduk Indonesia yang pluralistik menjadi satu bangsa. Mending Bung Karno menghabiskan seluruh hidupnya untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Betapa sulitnya perjuangan tersebut, Clifford Geertz (1970) memberi predikat pada perjuangan bangsa selama 25 tahun pertama sebagai "Integrative Revolution".

Untuk mempersatukan bangsa yang pluralistik itu diperlukan simbol simbol yang mempunyai kekuatan sebagai perekat (integrative factor). Walaupun kebutuhan akan simbol pemersatu itu sudah disadari oleh para pelopor kemerdekaan, sebagaimana tercermin dalam Sumpah Pemuda 1928, kenyataan masih banyak simbol pemersatu bangsa yang harus dikembangkan untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Kebutuhan akan simbol pemersatu itu ditanggapi, antara lain, dengan pengakuan terhadap sejumlah pahlawan nasional disamping upaya pengembangan kebudayaan nasional sebagai kerangka acuan lintas lingkungan kebudayaan daerah.

Pengakuan kephlawanan Pangeran Diponegoro merupakan salah satu upaya pengembangan simbol yang mempunyai kekuatan integrative. Kenangan terhadap kepahlawanan pangeran Diponegoro pada umumnya terpusat pada perjuangan fisik melawan kekuatan kolonial Belanda. Walaupun kesan itu tidak salah, akan tetapi itu bukan segalanya, bahkan terkesan mengecilkan peran kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Peran kepahlawanan Pangeran Diponegoro tidak terbatas pada perjuangan bersenjata melawan kekuatan kolonial, melainkan juga penanaman nasionalisme (walaupun masih terbatas), perjuangan menegakan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan umum atas dasar nilai-nilai budaya luhur dan keyakinan keagamaan. Dengan lain perkataan kepahlawanan Pangeran Diponegoro tidak terbatas pada sektor pertahanan dan keamanan, melainkan juga meletakkan dasar nasionalisme sebagai sarana pemersatu dan memberikan arah perjuangan bersama, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur bagi bangsa (Jawa).

Mengingat alasan tersebut, berbagai peran kepahlawanan Pangeran Diponegoro akan diulas sebagai berikut :

PEMERSATU KAUM (BANGSA)-NYA : Peran utama yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro adalah sebagai perekat sosial (Social Integrative Factor) di kalangan masyarakat perdesaan yang terpecah dalam sejumlah komuniti pedesaan yang tersebar di berbagai kawasan atau lungguh yang dikuasai kerabat kraton maupun pejabat tinggi lainnya.

Sebagaimana di ketahui masalah utama yang dihadapi para penguasa Jawa di masa lampau adalah pengerahan tenaga kerja untuk mengolah tanah pertanian yang mereka kuasai sebagai lungguh dan pengerahan pasukan apabila diperlukan raja sewaktu-waktu. Rakyat sebagai kawulo cilik, seolah-olah menjadi bagian yang melekat pada lungguh yang diberikan oleh raja sebagai imbalan kesetiaan kepada para pejabat tinggi. Tanah Lungguh itu dapat ditarik dan dibagikan kembali kepada pejabat baru sebagai penghargaan. Karena itu hubungan antar kawulo cilik dengan pejabat yang bertindak sebagai "tuan tanah" atau majikan (patron) tidak kekal.

Demikian pula mobilitas penduduk cukup tinggi, karena mereka dapat berpindah majikan untuk menghindari tekanan yang terlalu kuat, walaupun seringkali harus menghadapi tekanan para centeng. Kemurahan dan besarnya perlindungan majikan menjadi daya tarik yang mempermudah untuk memperluas pengaruh dan menghimpun banyak tenaga kerja yang diperlukan untuk mengolah tanah lungguh maupun untuk dikerahkan sebagai prajurit. Dengan memperbesar jumlah tenaga kerja, seorang pejabat tinggi dapat memperluas lahan pertanian dan memperkaya dirinya serta mendapatkan promosi sesuai dengan besarnya jumlah pasukan yang dapat dikerahkan sewaktu-waktu. Itulah sebabnya kepangkatan para pejabat itu dikaitkan dengan besar kecilnya tenagakerja yang dikuasai dan dapat dikerahkan sebagai pasukan. Mulai dari "Penglawe" atau ketua dari 25 orang, "Paneket" atau limapuluh orang bawahan, "Penatus" atau 100 bawahannya sampai pada "Panewu" atau 1000 orang perajuritnya.

Mengingat kenyataan tersebut, para pejabat kerajaan sangat berkepentingan untuk menghimpun sebanyak mungkin penduduk di wilayah kekuasaannya agar dapat meningkatkan jumlah kekayaan dan mendapatkan promosi jabatan. Dalam suasana tanpa kepastian akibat perebutan tahta yang tidak kunjung berakhir yang berawal pada masa pemerintahan Hamengku Buwono I, keamanan dan kenyamanan hidup penduduk sangat terganggu. Selain setiap waktu mereka harus meninggalkan keluarga untuk bergabung dengan pasukan penguasa setempat, mereka juga dapat tergusur dari tempatnya bermukim karena pergeseran pejabat dan realokasi tanah lungguh yang terjadi.

Dalam suasana tanpa kepastian itulah masyarakat Jawa memerlukan pemimpin yang dapat menjamin keamanan dan keadilan demi kelangsungan hidup pribadi dan keluarganya. Tokoh Pangern Diponegoro yang selama ini "tersisihkan" kalau tidak menyisihkan diri dari pertikaian politik maupun perebutan kekuasaan, muncul sebagai tokoh panutan yang tepat. Pangeran Diponegoro dikenal luas oleh masyarakat Jawa sebagai pemimpin yang jujur, kuat kepribadiannya dan tanggap terhadap kondisi lingkungan sosial dan budayanya. Iapun dikenal sebagai seorang yang bersahaja dan tidak mendahulukan kekayaan materiil sebagai penganut agama Islam yang setia.

Sikap hidup yang mendahulukan kepentingan rakyatnya bahkan cenderung mengorbankan kepentingannya sebagai putra mahkota demi kesejahteraan rakyat dan keutuhan kerajaan telah berhasil memenangkan hati penduduk yang menerimanya sebagai tokoh pemersatu.

Sesungguhnya, dengan kepribadiannya yang kuat dan tidak mendahulukan keuntungan maupun kedudukannya dalam kerajaan, Pangeran Diponegoro dengan mudah menanamkan dan memperluas pengaruhnya sehingga disegani oleh lawan maupun kawan. Selain kepribadian yang kuat dan darah biru yang mengalir ditubuhnya, menjadi kekuatan untuk menanamkan kepercayaan dan memperluas pengaruh sebagai pemersatu, Pangeran Diponegoro juga mempunyai keunggulan sebagai tokoh Islam yang memperkenalkan ajaran agama Islam yang pada waktu itu menjadi lambang pembebasan dari kungkungan adat dan kebudayaan Hindu Jawa yang mengukuhkan struktur sosial yang membedakan hak dan kewajiban penduduk yang berstrata secara tajam.

Dengan ke tiga keunggulan yang dimilikinya itulah Pangeran Diponegoro dengan mudah mengembangkan perannya sebagai pemersatu kaumnya yang terpecah dalam sejumlah besar komunitas perdesaan dan menjadi rebutan sumberdaya manusia antar penguasa. Peran pemersatu itu bertambah penting ketika masyarakat Jawa mengalami akulturasi akibat meningkatnya intensitas pengaruh kebudayaan asing yang dipaksakan oleh penguasa kolonial. Berbagai peraturan baru yang menyangkut pola-pola interaksi sosial antar sesama warga dan dengan atasan pribumi maupun dengan penguasa kolonial, telah menimbulkan kekacauan orientasi yang berpotensi memecah keutuhan komunitas sampai tingkat pedesaan. Demikian pula berbagai peraturan yang menyangkut "perpajakan" kolonial, telah merubah pola-pola jaringan sosial dan orientasi sosial masyarakat setempat. Keadaan inilah yang menimbulkan kebutuhan akan tokoh pemersatu yang dapat diterima oleh semua pihak, khususnya masyarakat Jawa pada waktu itu.

Kekuatannya sebagai pemersatu itu dibuktikan dalam menghimpun kekuatan pasukan ketika Pangeran Diponegoro hendak memulai perlawanan terhadap kekuatan kemapanan yang memeras dan mengganggu keamanan umum. Dalam waktu yang relatif singkat, Pangeran Diponegoro dapat menghimpun kekuatan "bersenjata" terdiri dari puluhan ribu orang yang berdatangan di pusat perlawanan "rakyat" di Tegalrejo.

KECERDASAN DAN TAWAQAL: Dalam pengembangan kepemimpinannya, Pangeran Diponegoro senantiasa mengutamakan kecerdasan daripada emosi dan kepentingan pribadinya. Boleh dikatakan bahwa ia senantiasa bertindak profesional dalam membuat keputusan mendahului tindakannya. Hal itu tercermin betapa, sebagai putra mahkota, Pangeran Diponegoro tidak serta merta menuntut haknya untuk menggantikan ayahandanya Hamengku Buwono III. Bahkan iapun menolak ketika diminta untuk menggantikan kedudukan ayahandanya sebagai Hamengku Buwono IV, dan dengan cerdas dan santunnya ia mengajukan adiknya Pangeran Jarot. Penolakan tersebut mencerminkan betapa kecerdasan Pangeran Diponegoro dalam mengambil keputusan demi keleluasaan dirinya memimpin langsung rakyatnya.

Untuk menolak ganjaran kedudukan tertinggi dalam kerajaan dan tanah lungguh iapun menggunakan dalih keagamaan sebagai cermin ketaqwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pangeran Diponegoro menolak ganjaran tanah lungguh yang terbaik dengan kebijaksanaan menggunakan dalih spiritual: "Apakah yang sesungguhnya diperlukan manusia dalam hidupnya didunia ini untuk keperluannya sehari-hari. Banyak atau sedikit semuanya cukup asalkan saja ia merasa puas dan selalu bersyukur terhadap apa yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Mahakuasa

kepadanya, baik di dunia maupun di akhirat". Ungkapan yang menunjukkan keluhuran budi pekerti itu justru diungkapkan dalam Babad yang ditulis oleh musuhnya, Cakranegara.

Pangeran Diponegoro juga tidak segan-segan memberikan pertimbangan dan kebijakan ke pada ayahandanya menghadapi tipudaya pihak kolonial yang menjerumuskan, seperti kebijakan untuk menyewakan tanah kepada pengusaha asing. Bahkan iapun menolak idea menerima uang sewa dari petani yang menggarap tanah miliknya. Berkali-kali Pangeran Diponegoro mencari jalan tengah untuk menyelesaikan pertikaian yang berujung peperangan dengan pihak kolonial demi ketentraman rakyatnya. Sayang pihak kraton tidak sepaham karena lebih suka menikmati hidup sebagai "aparatus" yang digaji oleh pemerintah kolonial.

Ketika usaha damai penuh kebijakan itu tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari pihak penguasa kolonial maupun petinggi kraton, nampaknya tiada lain pilihan bagi Pangeran Diponegoro untuk menggunakan kekerasan senjata. Perang Diponegoro merupakan pilihan akhir. Hanya dengan pengorbanan yang besar, orang dapat membangun masyarakat baru yang bebas dari penindasan dan pemerasan. Karena itu Pangeran Diponegoro seraya menunjuk pembantu-pembantunya yang terpercaya untuk memimpin pasukan, seperti Pangeran Mangkubumi (putra HB II, saudara kandung HB III atau paman Pangeran Diponegoro), yang walaupun sudah lanjut usianya akan tetapi masih besar semangat juangnya untuk membebaskan rakyat dari segala bentuk penindasan. Kehadiran Pangeran Mangkubumi sebagai sesepuh sangat mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro yang dapat mempercayakan keluarganya di belakang medan peperangan.

Untuk memimpin pasukan, Pangeran Diponegoro mengangkat panglima yang handal, Pangeran Jayakusuma. Disamping kerabat kraton, Pangeran Diponegoro juga mengangkat ulama besar dari daerah Sala, yaitu Kyai Maja yang menyertakan putra dan kerabat dekatnya. Panglima perang yang tidak kalah kepiawaiannya dalam siasat peperangan juga memperkuat perjuangan Pangeran Diponegoro, yaitu Sentot Alibasyah Prawiradirja cucu Sultan HB I.

Kecerdasan Pangeran Diponegoro dalam memilih pembantunya itu terbukti dalam kejutan dan kemenangan pertempuran di awal peperangan. Pemerintah kolonial terpaksa memperkuat pasukan dan mendatangkan beberapa jenderal untuk memecah kekuatan pasukan Pangeran Diponegoro. Tidak sedikit korban yang tewas di pihak Belanda, termasuk bumi putra dan kerabat kraton yang berpihak pada kekuatan kolonial. Dalam kesibukan peperangan, Pangeran Diponegoro menyempatkan diri untuk menyatakan belasungkawa atas tewasnya beberapa kerabat yang berpihak pada musuh dengan alasan bahwa peperangan yang Pangeran kobarkan itu ditujukan untuk menghancurkan kekuatan asing yang menindas dan memeras rakyat.

Tuduhan keji seolah-olah Pangeran Diponegoro mengangkat senjata melawan kekuatan asing maupun pribumi yang menindas rakyat karena kekecewaannya tidak mendapatkan kedudukan terhormat dalam kerajaan dipatahkan oleh pernyataan-pernyataan Cakranegara sebagai musuh yang justru memuji perjuangan Pangeran Diponegoro merupakan perjuangan suci yang dilandasi kesucian dan kesederhanaan hidup sang pemimpin

RATU ADIL

Selain tekanan sosial, politik dan keamanan akibat pertikaian internal kerabat raja, Gangguan keamanan dan kenyamanan hidup itu juga timbul karena pengaruh kekuasaan kolonial yang semakin dalam menguasai kehidupan sosial, politik, ekonomi dan keamanan di pedesaan. Berbagai peraturan dan perundangan dipaksakan oleh penguasa Kolonial sebagai imbalan jasa atas kemenangan salah satu pihak yang bertikai. Ternyata dampak intervensi penguasa kolonial itu tidak terbatas di kalangan penguasa yang harus tunduk pada berbagai peraturan protokoler yang dipaksakan, melainkan juga sa yang harus menyerahkan sebagian hasil bumi (landrente) dan bhkan sebagian tanahnya yang subur untuk kepentingan perluasan perkebunan.

Untuk mengatasi ketidakpastian dan melawan perlakuan yang tidak adil dari penguasa besar diterima kalangan luas masyarakat Jawa yang tertindas. Kepemimpinan Pangeran Diponegoro menjanjikan , kalau tidak memperkenalkan idea kebebasan, persamaan, dan persaudaraan yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkahlakunya maupun agama Islam yang dianutnya.

Sesungguhnya meningkatnya intensitas tekanan kekuasaan kolonial terhadap kerajaan di Jawa bermula dengan perdamaian Ganti (1755) yang dipandu oleh penguasa kolonial dan berhasil membagi kerajaan Jawa menjadi dua. Pembagian kerajaan itu bukan sekedar menentukan dua penguasa baru dengan wilayah kekuasaan masing-masing, melainkan menuntut perhatian yang lebih mendalam dalam hal persebaran penduduk dan tata letak geografik yang sangat besar pengaruhnya terhadap kemampuan adaptasi penduduk

Penentuan batas wilayah kekuasaan kedua negara yang dilakukan di atas peta, telah menimbulkan kekacauan orientasi kesetiaan penduduk terhadap "majikannya". Mereka yang mengutamakan kesetiaan pada majikannya, terpaksa harus berpindah tempat tinggal kalau kediaman lama telah ditentukan menjadi wilayah raja yang lain. Bagi mereka yang penguasa baru. Keduanya menuntut proses penyesuaian kembali (readjustment process) dengan lingkungan alam tauapun lingkungan sosial masing-masing. Persoalan sosial juga muncul akibat kepentingan ekonomi penduduk yang menyandarkan sumber nafkahnya dengan mengolah tanah. Tidak mudah bagi mereka untuk berpindah permukiman yang belum tentu menyediakan lahan pertanian yang selama ini mereka tekuni. Sementara itu kesetiannya pada majikan tidak mudah dibeli dengan uang, karena menyangkut keamanan dan kenyamanan hidupnya.

Masalah lain yang tidak kalah beratnya adalah penentuan batas wilayah kekuasaan kerajaan yang mengabaikan lokasi dan kondiisi georafik yang menimbulkan persilangan wilayah. Penduduk dari satu kerajaan harus melintasi wilayah kerajaan lain untuk mencapai pedesaan lain karena pembagian wilayah yang tidak memperhatikan tataletak dan kondiisi geografik. Akibatnya pertikaian sosial seringkali terjadi dan tidak jarang membangkitkan kekerasan kalau tidak dikatakan pertempuran lokal.

Sementara itu cengkeraman penguasa kolonial terhadap kehidupan sosial dan kebudayaan semakin kuat. Sesungguhnya pemerintah kolonial manapun dan di manapun senantiasa berusaha memberlakukan kebudayaan mereka atas penduduk di daerah jajahannya. Di lain pihak penduduk setempat senantiasa menolak kekuasaan kolonial, karena mereka lebih nyaman dan lebih aman

menggunakan kebudayaan sendiri sebagai kerangka acuan dalam beradaptasi terhadap lingkungannya dalam arti luas. Namun demikian, dengan kekuasaan politik dan kekuatan militernya, penguasa kolonial senantiasa berusaha memaksakan kehendaknya dan memberlakukan kebudayaan mereka sebagaimana berlangsung di Jawa sejak berkuasanya Gubernur Jendral Daendels yang terkenal keras dan tidak segan segannya menggunakan tangan besi.

Dengan kekuasaan politik dan kekuatan militer Daendels memaksakan berbagai peraturan dan protokol dalam istana raja Jawa yang menyinggung kehormatan Sultan Hamengku Buwono II beserta perangkat kerajaan. Pemberlakuan Tata tertib dan tatanan sosial kolonial di lingkungan istana sebagai panutan, telah menimbulkan kekacauan orientasi budaya rakyat Jawa.

Pesatnya perkembangan sosial dan kebudayaan, baik yang dipacu oleh dinamika sosial masyarakat Jawa maupun pengaruh kebudayaan asing yang dibawa serta ataupun dipaksakan oleh penguasa kolonial telah memacu akulturasi di kalangan masyarakat Jawa.

Akulturasi itu bertambah parah dampaknya sebagai akibat peralihan kekuasaan kolonial Belanda ke pada penguasa kolonial Inggris. Tindakan semena-mena Gubernur Jenderal Daendels di lanjutkan oleh Raffles tanpa mengindahkan tatanan sosial, politik dan kebudayaan Jawa. Berbagai peraturan kolonial diberlakukan seperti perpajakan dan sewa-menyewa tanah pertanian untuk keperluan pengembangan perkebunan. Demikian juga pengebirian hak kerajaan untuk mendapatkan penghasilan dari rakyatnya diganti dengan gaji tetap seolah-olah para raja Jawa itu merupakan pegawai pemerintah kolonial.

Berbagai peraturan dan perundang-undangan, diawali dengan pemaksaan tatanan protokoler dalam kraton, yang mengatur hubungan-hubungan dan interaksi sosial yang resmi ataupun tidak resmi antara raja dan perangkatnya dengan pejabat pemerintah kolonial, tidak hanya menimbulkan kekacauan orientasi sosial penduduk, melainkan juga memicu akulturasi atau perubahan sosial yang cukup kuat.

Tidak urung pembaharuan dalam tatanan sosial maupun hubungan politik antar pemerintah kolonial itu telah menimbulkan sikap pro dan kontra di kalangan masyarakat luas. Ada sementara kelompok yang tersinggung dan merasa terancam kemapanannya akibat perubahan termaksud. Sebaliknya ada pula yang mendukung perubahan sebagai sarana untuk memperlancar mobilitas sosial mereka.

Sikap Pro dan kontra terhadap perubahan sosial adalah gejala sosial yang biasa di kalangan masyarakat dunia. Dinamika sosial itu dapat dipacu karena perubahan lingkungan alam maupun perkembangan iptek, dapat memacu perubahan sosial dan perkembangan kebudayaan setiap waktu. Masalahnya adalah pertikaian yang mungkin timbul antara kekuatan konservatif yang memuja-muja masa lampau (post figurative view) mendapat perlawanan dari mereka yang mendambakan kemajuan (co figurative view) sebagai sarana untuk memperlancar mobilitas sosial mereka. Penolakan segala bentuk pembaharuan kebudayaan itu bisa memicu pertikaian sosial dengan damai maupun disertai kekerasan (violent conflict), tercermin dalam pembentukan 2 kelompok yang bertikai dalam kerajaan. .

Pertikaian antar penguasa dalam menghadapi akulturasi itu meluas keluar lingkungan kraton dan memacu munculnya berbagai gerakan sosial yang menolak segala bentuk pembaharuan kebudayaan yang dianggapnya sebagai biangkeladi kesengsaraan rakyat. Gerakan sosial pada umumnya menghendaki pensucian (purifikasi) dalam kehidupan sosial budaya masyarakat yang telah tercemar oleh pengaruh kebudayaan asing yang nota bene dibawa dan dipaksakan oleh pihak kolonial. Untuk melaksanakan pembersihan dari pencemaran kehidupan sosial budaya masyarakat itu diperlukan kepemimpinan seorang Ratu Adil.

Kehadiran Pangeran Diponegoro dengan sikap terjang dan ketauladanannya merupakan tokoh ideal yang memenuhi kerinduan masyarakat Jawa yang tertekan oleh keadaan. Kepada Ratu Adil itulah harapan terakhir masyarakat Jawa diarahkan untuk mengentas mereka dari kesengsaraan akibat pencemaran kebudayaan kolonial yang dipaksakan.

Sesungguhnya Pangeran Diponegoro merupakan tokoh ideal yang didambakan segenap penduduk karena kepribadiannya yang kuat, kejujurannya dalam memimpin rakyatnya, keperdulannya terhadap penderitaan rakyatnya, kesiapannya untuk bertindak dan memimpin perjuangan menegakan keadilan. Tidaklah mengherankan kalau dalam setiap pertikaian internal maupun dengan pihak asing peran Pangeran Diponegoro selalu diperhitungkan. Kepahlawanan Pangeran Diponegoro tidak terbatas pada kegiatan praktis dalam menghadapi berbagai masalah sosial, politik ekonomi dan keamanan, melainkan meluas ke ranah pendidikan.

Sikap hidup dan sikap terjang Pangeran Diponegoro menjadi tauladan bagi banyak penduduk dan terutama para pengikutnya yang setia. Oleh karena itu kepahlawanan Pangeran Diponegoro itu juga bersifat edukatif, terutama dalam ketauladan dan pembentukan kepribadian yang kuat bagi para pengikut dan keturunan mereka. Hidup sederhana, tidak materialistik, bersikap terbuka, berpegang pada adat dan agama, hindarkan kekerasan dalam menyelesaikan pertikaian. Perjuangan selama peperangan Diponegoro telah berhasil menanamkan semangat kebangsaan (Jawa) dalam menghadapi penindasan dan pemerasan kekuatan penguasa yang sewenang-wenang dan kekuatan asing. Sayangnya kepercayaan pada kekuatan diri dan pengikutnya, serta ketakwaannya kepada Tuhan Yang Mahakuasa tidak cukup untuk menghadapi kekuatan kolonial yang menggunakan segala taktik dan strategi yang menghalalkan segala untuk mematahkan kekuatan pasukannya. Dengan tipu daya pemerintah Belanda dan pengkhianatan pejabat keraton, Pangeran Diponegoro ditangkap untuk diasingkan ke luar pulau Jawa dan dijauhkan dari pengikut setianya.